

**COLLABORATIVE GOVERNANCE MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK
PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Doni Danan Dito

NPP. 31.0442

Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : donidananditod3@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): although there was an increase in regional election participation from 2015 to 2020, the participation rate is still below the average for Central Java Province. Additionally, the significant number of first-time voters in Purworejo emphasizes the importance of effective political education. This district has started implementing Collaborative governance through Bakesbangpol, but it still needs improvement.

Objective: The aim of this research is to determine and analyze Collaborative governance between government, academics, the private sector, society and the press in improving political education for novice voters in Purworejo Regency. **Method:** This research uses a qualitative method with a descriptive and deductive approach. Primary data sources were obtained through interviews, while secondary data were collected from related documents. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection techniques include semi-structured interviews and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. **Results/Findings:** Collaborative governance between the government and the community, media and academics has run smoothly but is not yet fully optimal, this is because private actors have not been actively involved in activities to increase understanding of political education for novice voters in Purworejo Regency. **Conclusion:** Actively involve private actors through a persuasive approach and identify the benefits obtained through active participation in political education.

Keywords: Collaborative Governance, Political Education, New Voters, Participation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): meskipun ada peningkatan partisipasi Pilkada dari 2015 ke 2020, tingkat partisipasinya masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, jumlah pemilih pemula yang signifikan di Purworejo menekankan pentingnya pendidikan politik yang efektif. Kabupaten ini telah mulai menerapkan *Collaborative governance* melalui Bakesbangpol, tetapi masih memerlukan perbaikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis *Collaborative governance* antara pemerintah, akademisi, swasta,

masyarakat, dan pers dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan deduktif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** *Collaborative governance* antara pemerintah dengan pihak komunitas, media, dan akademisi telah berjalan lancar namun belum optimal sepenuhnya, hal ini karena aktor swasta belum terlibat secara aktif dalam kegiatan peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. **Kesimpulan:** Melibatkan aktor swasta secara aktif melalui pendekatan yang persuasif dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam pendidikan politik.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Partisipasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Pemilihan Umum (Pemilu) memungkinkan rakyat memilih wakil mereka dan merupakan pilar utama demokrasi. Partisipasi politik, seperti memilih dan mempengaruhi kebijakan, sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Menurut Rod Hague dalam (Budiardjo, 2008) politik adalah proses mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Kebijakan pemerintah dihasilkan dari kegiatan politik yang memperoleh legitimasi melalui Pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih perwakilan di berbagai lembaga negara.

Pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Untuk meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Selain itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu politik dan pembangunan daerah. Pemerintahan kolaboratif, seperti yang diterapkan di Kabupaten Purworejo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kolektif. Meskipun partisipasi masyarakat sudah meningkat melalui model ini, tantangan masih ada dalam meningkatkan pemahaman politik, terutama di kalangan pemilih pemula. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan pendidikan politik yang efektif dan inklusif.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP)

Di Provinsi Jawa Tengah, terjadi peningkatan partisipasi dalam Pilkada dari tahun 2015 ke 2020. Kabupaten Purworejo, khususnya, mengalami kenaikan partisipasi pemilih dari 61,75% pada tahun 2015 menjadi 73,11% pada tahun 2020. Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan, tingkat partisipasi di Purworejo masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 74,71%. Selain itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) meningkat pada Pemilu 2024, dengan pemilih pemula mendominasi jumlah tersebut (Astreawan, 2022). Tantangan yang dihadapi adalah pemilih pemula ini sering kali kurang memahami isu-isu politik dan cenderung

bersikap apolitis. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik yang informatif di kalangan pemilih muda. Pendidikan politik bagi pemilih pemula belum optimal, terlihat dari banyaknya pemilih pemula yang tidak memahami pentingnya partisipasi politik dan tidak menyadari bahwa suara mereka berperan dalam menentukan nasib bangsa. Kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media, masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Selain itu, peran media dan teknologi informasi dalam pendidikan politik belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan kampanye online yang lebih efektif dapat membantu menyebarkan informasi yang relevan dan menarik bagi generasi muda, sehingga mereka lebih terlibat dan sadar akan pentingnya partisipasi politik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bersumber dari beberapa penelitian sebelumnya, yang telah digunakan sebagai referensi dan upaya peneliti untuk memperluas pengetahuan terkait dengan topik yang diteliti. Peneliti mengacu pada enam penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini yaitu: Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan (Yeli Miftha Huljana, 2022), Kehadiran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula (Farabi, 2022), Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (Widianti, 2023), Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Dan Pilkada Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Mustofa, 2023), Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula (M. Eggi Trywandi, Qori Aliffiani, Putriyani Juliati, 2023), serta Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur (Ferdeline Lunga Nani, Hyronimus Rowa, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *collaborative governance* antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan pers dapat meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini unik karena berbeda dari penelitian terdahulu yang mungkin hanya fokus pada satu atau dua aktor saja, sementara penelitian ini mencakup lima aktor utama. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan deduktif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008) yang memiliki empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dengan

pendekatan dan indikator ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana *Collaborative governance* dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan *Collaborative governance* antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan pers dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis dan deskripsi faktor-faktor penghambat dalam pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo serta merumuskan strategi peningkatan *collaborative governance* untuk pendidikan politik pemilih pemula di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan deduktif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008) yang memiliki empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kolaborasi antar aktor serta mengidentifikasi hambatan dan strategi untuk meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan deduktif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan dokumentasi (Sahir, 2022).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo sebagai unsur pemerintah, pengusaha lokal sebagai unsur swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai unsur komunitas, Radio Irama FM sebagai unsur media, serta pengajar di SMA Negeri 7 Purworejo sebagai unsur akademisi.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) yang memiliki empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Kondisi awal mencakup latar belakang dan situasi yang melatarbelakangi perlunya kolaborasi. Desain kelembagaan merujuk pada struktur dan aturan yang mengatur kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif menekankan peran pemimpin dalam memfasilitasi dan memotivasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Proses kolaborasi mencakup interaksi, dialog, dan kerja sama yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penerapan konsep pentahelix dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008). Konsep pentahelix melibatkan lima unsur utama yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Fokus penelitian adalah pada bagaimana kolaborasi antara kelima unsur ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula.

Teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008) (Astuti et al., 2020) menyediakan kerangka analisis dengan empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Kondisi awal mencakup latar belakang rendahnya partisipasi dan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, serta faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut. Desain kelembagaan merujuk pada struktur organisasi dan aturan main yang mengatur kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media, termasuk kebijakan, mekanisme koordinasi, dan regulasi yang mendukung kerja sama. Kepemimpinan fasilitatif menekankan peran pemimpin dalam memfasilitasi dan memotivasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Proses kolaborasi mencakup interaksi, dialog, dan kerja sama yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan akhir meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam *collaborative governance* menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Beberapa indikator dari kondisi awal ini mencakup adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses kolaboratif. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan salah satu pihak mendominasi proses pengambilan keputusan atau menghambat partisipasi yang setara dari semua pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan adanya insentif yang jelas bagi semua pihak untuk berkolaborasi. Insentif ini dapat berupa manfaat langsung maupun tidak langsung yang dapat diperoleh dari partisipasi dalam kolaborasi, seperti peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, atau pencapaian tujuan bersama. Selain itu, ada juga ketakutan akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilakukan, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perspektif, atau pendekatan antara pihak-pihak yang terlibat. Mengelola ketakutan ini memerlukan pendekatan yang terbuka dan transparan, serta mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses kolaborasi. Dengan memahami dan mengelola kondisi awal ini, kolaborasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

1. Ketidakseimbangan Sumber Daya dan Pengetahuan Antar Pelaku Kolaborasi

Para aktor yang terlibat dalam kolaborasi sudah memiliki kemampuan dasar dalam menjalankan kegiatan pendidikan politik, meskipun belum semua dari mereka melakukan kegiatan yang spesifik untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para aktor dalam kolaborasi telah memiliki kesadaran dan kemampuan dasar dalam menjalankan kegiatan pendidikan politik, mereka belum mencapai tahap di mana mereka mampu melakukan pendidikan politik yang khusus ditujukan bagi pemilih pemula. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kemampuan dan pemahaman para aktor ini. Langkah-langkah tersebut termasuk pelatihan khusus, penyusunan kurikulum yang sesuai, serta

pengembangan strategi yang efektif untuk menjangkau dan mendidik pemilih pemula. Dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman para aktor tentang kebutuhan khusus pemilih pemula, diharapkan pendidikan politik dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada partisipasi politik generasi muda.

2. Adanya Insentif Yang Jelas Dalam Berkolaborasi

Keterbatasan pemerintah daerah dalam memberikan insentif materil kepada semua aktor yang terlibat dalam kolaborasi kegiatan pendidikan politik, terutama aktor non-pemerintah, seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama-tama, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama, dimana alokasi anggaran yang tersedia harus diprioritaskan untuk berbagai program dan kegiatan lainnya yang dianggap penting. Kebijakan anggaran yang ketat juga turut membatasi fleksibilitas dalam penggunaan dana publik, termasuk pembatasan terhadap pengeluaran untuk insentif dan penghargaan. Selain itu, prioritas penggunaan anggaran menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah, dimana infrastruktur, layanan kesehatan, atau pendidikan formal mungkin menjadi prioritas yang lebih tinggi. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga harus dijaga, sehingga pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran terhadap insentif materil dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

3. Adanya Ketakutan akan Terjadinya Konflik jika Kolaborasi Dilakukan

Dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pendidikan politik pemilih pemula secara umum, tidak terjadi konflik serius yang menghambat proses. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula telah berjalan relatif lancar. Para aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media, mampu bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun mungkin terdapat perbedaan pendapat atau prioritas di antara para pemangku kepentingan, kolaborasi tersebut mampu menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara yang produktif. Dengan demikian, tercipta lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif, di mana setiap pihak dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula tanpa adanya konflik yang menghambat proses.

3.2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada prinsip dan aturan dasar yang mengatur kolaborasi, yang erat kaitannya dengan legitimasi dalam proses kolaborasi. Desain ini harus memastikan bahwa kolaborasi berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu bersikap terbuka dan inklusif, memungkinkan partisipasi dari semua aktor yang relevan. Desain kelembagaan ini melibatkan beberapa indikator, termasuk partisipasi, forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan yang mendukung kolaborasi, dan proses penyelenggaraan kolaborasi. Dengan adanya mekanisme partisipasi yang inklusif, forum yang memfasilitasi dialog dan kerja sama, serta aturan yang jelas untuk mendukung kolaborasi, desain kelembagaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula.

1. Partisipasi

Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan media radio penyiaran, menjadi kunci dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten

Purworejo. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan nonpemerintah, pelaksanaan peningkatan pendidikan politik dapat berjalan secara optimal. Pemerintah memberikan landasan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan politik, sementara sekolah berperan sebagai agen utama dalam menyediakan wadah untuk mendidik pemilih pemula melalui kurikulum yang relevan dan kegiatan ekstrakurikuler. Media radio penyiaran juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi politik secara luas dan merata kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula. Kolaborasi antara ketiga pihak ini memungkinkan adanya sinergi antarlembaga, yang menghasilkan program pendidikan politik yang komprehensif dan efektif. Dengan demikian, melalui partisipasi aktif dari pemerintah, sekolah, dan media radio penyiaran, serta kolaborasi yang kokoh di antara mereka, pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Forum Kolaborasi Kelembagaan

Beberapa aktor menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi di Kabupaten Purworejo. Baik itu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, maupun media lokal, semuanya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Pemerintah daerah berperan sebagai inisiator dan fasilitator dalam menyediakan dukungan kelembagaan dan sumber daya untuk melaksanakan program pendidikan politik. Sementara itu, lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif, seperti debat politik, seminar, dan pelatihan kepemimpinan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik dan demokrasi kepada generasi muda. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil turut berperan dalam menyediakan ruang partisipasi dan advokasi untuk mengajak pemuda terlibat dalam proses politik lokal. Media lokal, dengan jangkauan yang luas di masyarakat, menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan menyampaikan pesan-pesan politik yang bersifat edukatif. Dengan adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi dari berbagai aktor ini, diharapkan pemahaman politik dan demokrasi di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat, menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik dan aktif dalam proses demokrasi.

3. Aturan-Aturan Yang Mendukung Kolaborasi

Kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo didasari oleh landasan hukum yang jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta undang-undang yang relevan menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan ini. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya pendidikan politik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem politik dan demokrasi. Di samping itu, pihak sekolah juga tunduk pada peraturan internal yang mewajibkan mereka untuk menyelenggarakan program pendidikan politik. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo tidak hanya didasarkan pada keinginan moral, tetapi juga didukung oleh dasar hukum yang kokoh. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa generasi muda menjadi bagian yang aktif dan terampil dalam proses politik dan demokrasi.

4. Proses Penyelenggaraan Kolaborasi

Kolaborasi antar berbagai aktor, seperti sekolah, radio lokal, dan lembaga bantuan hukum, menjadi landasan kuat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Purworejo. Melalui kolaborasi ini, mereka bersama-sama berupaya menyampaikan informasi politik yang relevan kepada pemilih pemula dan masyarakat umum. Sekolah berperan sebagai agen utama dalam menyediakan wadah pendidikan, dengan menyelenggarakan program-program edukatif seperti seminar, debat, dan pelatihan kepemimpinan yang membantu meningkatkan pemahaman politik. Radio lokal, sebagai media yang memiliki jangkauan luas, menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang edukatif kepada masyarakat. Mereka menyediakan program-program khusus, seperti siaran talkshow atau diskusi politik, yang memberikan platform untuk berbagai pemangku kepentingan dalam berbagi informasi dan pandangan tentang politik lokal. Sementara itu, lembaga bantuan hukum memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara kepada masyarakat. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang solid dan sinergis antara sekolah, radio lokal, dan lembaga bantuan hukum, tercipta upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman demokrasi di Kabupaten Purworejo, menegaskan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih sadar politik.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Collaborative governance merujuk pada kolaborasi antara berbagai stakeholder, seperti pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan pers, dalam mencapai tujuan tertentu. Proses kolaborasi ini mencakup beberapa indikator penting yang memastikan efektivitasnya. Dialog tatap muka adalah indikator pertama yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara semua aktor yang terlibat. Pertemuan langsung memungkinkan diskusi mendalam, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat hubungan interpersonal. Membangun kepercayaan adalah fondasi utama dalam kolaborasi yang sukses, yang memerlukan transparansi, konsistensi, dan integritas dari semua pihak. Kepercayaan yang kuat memungkinkan kolaborator bekerja sama dengan lebih lancar, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Selain itu, membangun komitmen dari semua aktor yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen ini harus dibangun melalui kesepakatan bersama, di mana setiap pihak berkomitmen untuk berkontribusi dan bekerja keras demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator berikutnya adalah berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai misi, tujuan, dan permasalahan yang dihadapi untuk menyelaraskan tindakan dan strategi. Terakhir, melibatkan kesuksesan awal, perencanaan strategis, serta menemukan fakta bersama adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki dasar yang kuat untuk bekerja sama dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan indikator-indikator ini, proses kolaborasi dapat berjalan dengan efektif dan harmonis, menciptakan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

1. Mediasi

Dalam konteks kolaborasi untuk pendidikan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat. Mediasi menjadi alat yang digunakan oleh Bakesbangpol untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul di antara aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik. Melalui mediasi, Bakesbangpol bertujuan untuk

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak agar dapat berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, berbagai perbedaan atau konflik yang mungkin muncul dapat diselesaikan secara konstruktif, sehingga tercipta kerjasama yang efektif dalam upaya meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi dalam proses demokrasi.

2. Fasilitasi

Dalam upaya meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, kerjasama lintas sektor dan penyediaan fasilitas yang memadai merupakan hal yang sangat penting. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, Bakesbangpol berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program pendidikan politik. Selain itu, dalam hal penyediaan fasilitas, Bakesbangpol berusaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada secara efisien, serta melakukan upaya penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bakesbangpol tetap bertekad untuk memberikan layanan yang terbaik dan optimal dalam mendukung pemahaman politik yang lebih baik di kalangan pemilih pemula.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan memegang peranan krusial dalam upaya bersama untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Hal ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemilih pemula sendiri, sepanjang seluruh tahap program pendidikan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah memegang peran penting dalam menggerakkan pemberdayaan aktor-aktor lain dalam setiap langkah kegiatan pendidikan politik. Ini mencakup memberikan dukungan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program-program, serta memberikan akses dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik. Dengan cara ini, Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator utama dalam menggerakkan kolaborasi antarpihak dan memastikan bahwa pemilih pemula memiliki peran yang aktif dan berarti dalam pemahaman dan partisipasi mereka dalam ranah politik.

3.4. Proses Kolaborasi

Collaborative governance merujuk pada kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan pers, dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Proses kolaborasi ini melibatkan beberapa indikator penting. Pertama, dialog tatap muka sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara semua aktor yang terlibat. Pertemuan langsung memungkinkan diskusi mendalam, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat hubungan interpersonal. Kedua, membangun kepercayaan adalah fondasi utama dalam kolaborasi yang sukses. Kepercayaan memerlukan transparansi, konsistensi, dan integritas dari semua pihak, yang memungkinkan kolaborator bekerja sama dengan lebih lancar, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Ketiga, membangun komitmen dari semua aktor yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen ini harus dibangun melalui kesepakatan bersama, di mana setiap pihak berkomitmen untuk berkontribusi dan bekerja keras demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat,

berbagi pemahaman misi dan permasalahan yang dihadapi adalah kunci. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai misi, tujuan, dan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman bersama ini membantu dalam menyelaraskan tindakan dan strategi. Selain itu, melibatkan kesuksesan awal dan perencanaan strategis serta menemukan fakta bersama juga penting dalam memastikan bahwa semua pihak memiliki dasar yang kuat untuk bekerja sama dan mencapai hasil yang diinginkan.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka antara berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah suatu keharusan. Pertemuan langsung memfasilitasi komunikasi yang efektif, pertukaran informasi, serta diskusi yang mendalam mengenai berbagai permasalahan dan solusi yang relevan dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan politik. Dalam konteks ini, pertemuan langsung memungkinkan para aktor untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide inovatif yang dapat memperkaya strategi pendidikan politik yang sedang dijalankan. Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, dialog tatap muka menciptakan ruang bagi kolaborasi aktif, pemecahan masalah bersama, dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan demikian, pertemuan langsung menjadi landasan penting dalam membangun kerjasama yang kuat dan berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya akan menghasilkan program pendidikan politik yang lebih efektif dan relevan bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kolaborasi sangatlah krusial untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pendidikan politik. Pemerintah memiliki peran utama dalam membangun fondasi kepercayaan ini dengan cara menciptakan lingkungan yang inklusif dan transparan. Dalam konteks pendidikan politik, inklusivitas mengacu pada upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua suara dan perspektif didengar dan diakomodasi. Hal ini dilakukan dengan membuka ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok minoritas, dan komunitas yang mungkin kurang terwakili. Selain itu, transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah membantu memperkuat kepercayaan dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Ketika para pemangku kepentingan merasa bahwa pemerintah bertindak secara adil, terbuka, dan menghargai kontribusi mereka, maka kepercayaan antara semua pihak akan meningkat, membentuk dasar yang kuat untuk kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan dalam memajukan pendidikan politik di masyarakat.

3. Membangun Komitmen

Komitmen ini memastikan bahwa semua pihak benar-benar melaksanakan kerjasama dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan harapan bahwa Kabupaten Purworejo dapat mencapai tingkat demokrasi yang tinggi, yang tidak hanya memperkuat partisipasi politik tetapi juga menarik minat investor untuk berinvestasi, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, penting agar siswa-siswi memiliki pemahaman politik yang mendalam, memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik dan demokrasi di masa depan. Dengan pemahaman yang kuat tentang politik, generasi muda dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi terus ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini diharapkan akan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya,

aktif, dan berwawasan luas, yang mampu menghadapi tantangan politik dan ekonomi dengan lebih baik.

4. Berbagi Pemahaman Misi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Kerjasama dan komunikasi terbuka memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan bersama antara berbagai pihak terkait mengenai tujuan, tantangan, dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Melalui kerjasama yang erat dan komunikasi yang terbuka, berbagai pihak dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mengidentifikasi strategi terbaik dalam mendidik pemilih pemula. Kolaborasi yang baik diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik pemilih pemula di wilayah tersebut. Dengan membangun kerangka kerja yang inklusif dan saling mendukung, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif dan berkelanjutan bagi pemilih pemula, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi lokal dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

5. Melibatkan Kesuksesan Awal dan Perencanaan Strategis Serta Menemukan Fakta Bersama

Pentingnya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seragam dan efektif tentang situasi serta tantangan yang dihadapi tak terbantahkan dalam konteks pendidikan politik. Dengan pemahaman yang konsisten, semua pemangku kepentingan dapat berada pada halaman yang sama dalam menafsirkan kondisi yang ada, memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Melalui proses komunikasi yang terbuka dan transparan, informasi dapat disampaikan dengan jelas dan akurat kepada semua pihak, sehingga pemahaman yang seragam dapat terbentuk. Dengan demikian, kolaborasi antarpihak dapat diperkuat, memungkinkan mereka untuk bekerja secara sinergis dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam memahami politik dan proses demokrasi. Dengan memastikan keseragaman dalam pemahaman, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka dan mengoptimalkan hasil dalam mendukung pemahaman politik yang lebih baik dan partisipasi yang lebih aktif dari pemilih pemula.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh kelima aktor dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan dengan lancar. Namun belum optimal sepenuhnya, hal ini karena aktor swasta belum terlibat secara aktif dalam kegiatan peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ada beberapa kesamaan terkait proses peningkatan pendidikan politik seperti pada penelitian (Huljana & Baharudin, 2022) faktor sumber daya baik manusia maupun materil menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik. Serta penelitian oleh (Widianti, 2023) dimana pemerintah melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor guna sebagai upaya peningkatan pendidikan politik.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya kolaboratif antara pemerintah, komunitas, media, dan akademisi dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo, namun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Faktor-faktor

penghambat utama termasuk kurangnya sumber daya manusia di bidang politik dalam negeri, kurangnya koordinasi antar stakeholder, dan minimnya keterlibatan aktor swasta. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan politik, disarankan langkah-langkah strategis seperti peningkatan SDM melalui rekrutmen pegawai khususnya di bidang politik dan peningkatan kualitas pegawai, peningkatan koordinasi antar stakeholder melalui komunikasi yang efektif dan evaluasi, serta melibatkan aktor swasta secara aktif dengan pendekatan persuasif dan identifikasi manfaat dari partisipasi aktif mereka. Dengan memperbaiki faktor-faktor ini, diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purworejo.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, ibu saya Nuning Suswarini dan almarhum bapak saya, Suharyono. Ucapan terima kasih peneliti ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo beserta jajarannya, direktur Irama FM Purworejo, pengusaha lokal, pengajar di SMA N 7 Purworejo, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang terletak pada waktu dan biaya. Waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian seringkali terbatas, yang dapat membatasi kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan mendalam. Keterbatasan waktu juga dapat mempengaruhi proses analisis data, yang memerlukan waktu yang cukup untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan. Selain itu, biaya penelitian yang terbatas dapat membatasi akses peneliti ke sumber daya yang diperlukan, seperti perangkat lunak analisis data, transportasi untuk wawancara lapangan, atau akses ke literatur dan dokumen penting. Keterbatasan biaya juga dapat mempengaruhi jumlah dan variasi informan yang dapat diwawancarai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi representativitas dan validitas temuan penelitian. Akibat dari keterbatasan ini, penelitian mungkin tidak dapat mencakup semua aspek yang diinginkan secara mendalam, sehingga hasilnya mungkin perlu dilengkapi dengan penelitian lanjutan di masa depan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal, oleh karena itu disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula dalam Pilkada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Astreawan, I. G. S. (2022). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024*. KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>
- Astuti, R., Warson, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Progam Studi Doktor Administrasi Publik FISIPOL UNDIP Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farabi, Q. N. S. El. (2022). *Kehadiran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Bagi Pemilih*

- Ferdeline Lunga Nani, Hyronimus Rowa, A. M. (2021). *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur*. IPDN. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/466/>
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). *Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan*. 3(2), 1.
- M. Eggi Trywandi, Qori Aliffiani, Putriyani Juliati, D. (2023). *Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula*. KARIMAH TAUHID. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9958>
- Mustofa, I. A. L. I. (2023). *Strategi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Dan Pemilukada Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA.
- Widianti, I. R. (2023). *Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/15625/>
- Yeli Miftha Huljana, I. B. (2022). *Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan*. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/14871>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik